

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

Semboyan tersebut merupakan hasil dari mahakarsa akbar seorang bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang masih dianut dan dipegang teguh oleh Bangsa Indonesia hingga saat ini. Dalam semboyan tersebut, secara filosofis Ki Hajar Dewantara memberikan pembelajaran akan arti pentingnya suatu pendidikan bagi kesesejahteraan sebuah negara, khususnya arti penting seorang pendidik dalam mencetak pelajar yang kuat sebagai generasi penerus bangsa.

Data dari *Programme For International Student Assessment (PISA)* yang dikutip oleh (Jurnas.com, 2018) menyimpulkan bahwa kualitas dan daya saing pelajar di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari ranking buruk yang dimiliki Indonesia, dari 72 negara pelajar Indonesia hanya menempati ranking ke 63. Sedangkan riset yang dilakukan oleh professor Lant Pritchett dari Havard Kennedy School pada tahun 2018 yang dirangkum oleh (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) menyimpulkan bahwa Jakarta sebagai etalase dari Indonesia, anak-anak usia 15 tahun di Jakarta ketinggalan 128 tahun dari negara-negara maju. Secara logika, dapat kita simpulkan secara general dalam aspek pendidikan daerah diluar Jakarta tidaklah lebih baik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan memperbaiki kualitas pendidik (guru). Guru memiliki andil yang besar untuk membentuk karakter peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah telah memberikan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam undang-undang ini telah dijelaskan bahwa guru merupakan agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator dan inspirator bagi peserta didik.

Tanah Bumbu merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan umurnya yang baru menginjak 16 tahun, kini Kabupaten Tanah Bumbu mulai konsen dalam memperbaiki daerahnya, dimana salah satu fokus utamanya adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Keseriusan dalam memperbaiki kualitas pendidikan terbukti dalam visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 yang berbunyi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing”. Visi tersebut sejatinya adalah suatu upaya nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang akan berimplikasi pada SDM yang berdaya saing.

Dalam mencetak SDM yang berdaya saing tentu perlu dipersiapkan sejak dini. Salah satu upayanya adalah dengan menghadirkan kurikulum yang baik serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi guru dan siswa. Disamping itu adanya dukungan dari seluruh pihak, khususnya dukungan dari pemerintah daerah akan

menjadi tambahan kekuatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga akan menghadirkan generasi baru yang berdaya saing.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu menghadirkan program yang bernama “1000 Guru Berprestasi”. Program yang dimulai sejak 2017 ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

Program ini ditujukan kepada pendidik (guru) dari jenjang SD hingga SMP dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar kepada siswa. Guru yang berprestasi akan diseleksi dan kemudian didiklatkan selama satu bulan di Surya Institute Tangerang, dengan dana yang bersumber dari APBD dan CSR. Indikator terukur keberhasilan program ini adalah dengan meningkatnya keikutsertaan dan perolehan juara oleh pelajar (SD dan SMP) Tanah Bumbu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) baik dalam kancah Provinsi maupun Nasional (wawancara dengan Suharyono, S,Pd Kepala Seksi Pengembangan PTK).

Sebelum diimplementasikannya program 1000 Guru Berprestasi pada tahun 2016, medali OSN yang diperoleh siswa SD se-Kabupaten Tanah Bumbu baik tingkat provinsi maupun nasional adalah nihil alias 0. Namun setelah program ini diimplementasikan pada tahun 2017 keberhasilannya mulai terasa, yakni medali yang didapat dari OSN tingkat provinsi berjumlah 3 dan nasional 0. Sedangkan pada tahun

2018 juga mengalami peningkatan, yakni Tanah Bumbu mendapat 3 medali untuk provinsi dan 0 untuk nasional. Sementara itu, jumlah medali yang diperoleh siswa SMP se-Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016, yakni 2 untuk tingkat provinsi dan nasional 0. Angka ini juga meningkat pada tahun 2017, dimana untuk OSN jumlah juara yang diperoleh siswa SMP tingkat provinsi 2 dan nasional 0. Sedangkan peningkatan juga terjadi pada tahun 2018, yakni 3 provinsi dan 0 nasional. (Laporan Kejuaran OSN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017).

Dapat kita simpulkan dari data diatas, sejak berjalannya program ini keikutsertaan maupun juara yang diperoleh siswa SD dan SMP dalam kejuaraan OSN semakin meningkat setiap tahunnya. Tentunya hal ini merupakan pencapaian positif dan harapan baru bagi dunia Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara logis juga kita katakan bahwa program 1000 guru berprestasi ini mampu memberikan warna baru dalam dunia pendidikan di kabupaten Tanah Bumbu dan harapannya program ini dapat sebagai *role model* dalam meningkatkan kualitas Pendidikan yang berimplikasi pada hadirnya SDM yang berdaya saing diIndoneisa. Atas alasan dan pertimbangan tersebut maka penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program 1000 Guru Berprestasi Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu Tahun 2017-2018”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana implementasi Program 1000 Guru Berprestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2018 dalam meningkatkan kualitas pendidikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2018 dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat sebagai landasan pengembangan ilmu kebijakan publik. Selain itu juga dapat menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam aspek pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai *role model* kebijakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.

b. Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik.

c. Guru

Penelitian ini dapat sebagai peningkatan kualitas dan kreatifitas guru dalam rangka meningkatkan kinerja.

d. Siswa

Penelitian ini dapat menstimulasi minat dan motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non akademik.

E. STUDI TERDAHULU

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sumber referensi yang relevan. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran awal sebelum peneliti melakukan penelitian, sehingga dapat memperkuat kedalaman analisis dan substansi. Didalam tinjauan pustaka akan memuat hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian akan disimpulkan hasil dan perbedaan dari penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi dari penelitian ini, sehingga dapat menghindari dari terjadinya plagiatisme. Dibawah ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian terkait implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Hasil	Perbedaan
1	(Jurnal) Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru	Eka Prihatin Disas (2017)	Hadirnya kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru telah memberikan naungan hukum bagi para guru, disamping itu, pengetahuan dan profesionalitas seorang guru juga meningkat (Disas, 2017).	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun yang membedakan kedua penelitian ini terletak pada studi kasus yang digunakan sehingga fariabelnya juga berbeda.
2	(Jurnal) Masalah dan Dinamika Implementasi Kebijakan Tentang Transportasi (Kajian di Kota Tasikmalaya)	Awing Asmawi, Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar (2017)	Pembangunan layanan transportasi memiliki korelasi dengan adanya kesejahteraan sosial . Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa daerah yang memiliki kelengkapan transportasi yang lengkap, maka wilayah tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang baik (Asmawi,	Perbedaan kedua penelitian ini hanya terletak pada studi kasus yang digunakan. Pada dasarnya kedua penelitian ini sama-sama mengangkat studi kasus yang merupakan masalah <i>urgent</i> untuk diteliti. Dimana pada kota Tasikmalaya menggunakan studi kasus

			Sjoraida, & Anwar, 2017)	transportasi, sedangkan pada kota Tanah Bumbu yang diteliti oleh penulis menggunakan studi kasus pendidikan.
3	(Skripsi) Efektifitas Program Siswa Pintar Warga Sukowati (SINTAWATI) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sragen 2013-2014	Aditya Damarika (2016)	Hadirnya program Sintawati di kabupaten sragen terbukti belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak putus sekolah di kabupaten sragen (Damarika, 2016).	Pada dasarnya penelitian ini dan penelitian penulis hampir memiliki kesamaan. Namun letak perbedaan pada penelitian ini adalah pada variabel judulnya. Pada penelitian tersebut variabelnya adalah terkait efektifitas, sedangkan penulis menggunakan variabel implementasi, sehingga hasil penelitian dapat lebih luas dan mendalam.
4	(Jurnal) Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam	Karimulah, Edi Susanto (2015)	Kebijakan pendidikan agama islam yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan hingga reformasi selalu mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut terjadi dari madrasah tinggi islam, baik dari sistem dan	Perbedaan kedua penelitian ini sangat jelas, dimana dalam penelitian tersebut meneliti kebijakan pendidikan bidang agama islam secara umum. Sedangkan penulis meneliti secara spesifik kepada implementasi

			implementasinya (Karimulah & Susanto, 2015).	kebijakan dari suatu program.
5	(Jurnal) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar	Ilham Arief Sirajuddin (2014)	Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif pada tingkat kepuasan masyarakat. Namun ketika dianalisa lebih dalam dari 5 indikator yang digunakan ada dua indikator yang memiliki pengaruh utama, yakni keandalan dan empati (Sirajuddin, 2014).	Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada metode yang digunakan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan penulis memfokuskan menggunakan metode kualitatif.
6	(Jurnal) Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Kota Malang	Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi (2013)	Program pelayanan administrasi kependudukan terpadu yang dilakukan dikota malang merupakan langkah maju dan pembaharuan dalam bidang pelayanan publik. Hal ini dikarenakan implikasi dari program tersebut akan merapikan dan memusatkan sistem administrasi kependudukan, sehingga akan memudahkan pemerintah kota malang dalam mengakses data secara konkret	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, sedangkan penulis menggunakan teori dari Grindle yang akan menjabarkan hingga aspek politik.

			(Rohman, Hanafi, & Hadi, 2013).	
7	(Jurnal) Evaluasi <i>Trend</i> Kualitas Pendidikan di Indonesia	Sabar Budi Rahardjo (2012)	Setiap satuan pendidikan memberikan tanggapan positif untuk menerapkan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas lulusan. Kualitas lulusan ini harus ditunjang dengan beberapa aspek, yakni isi sarpras, kualitas tenaga kerja, isi, penilaian, pengelolaan, proses dan pembiayaan yang harus dibenahi oleh sekolah (Raharjo, 2012).	Pada dasarnya kedua penelitian ini adalah bagian dari kebijakan publik dalam aspek pendidikan. Namun perbedaan mencolok dari keduanya adalah dari prosesnya. Penelitian diatas memfokuskan kepada evaluasi sedangkan penulis meneliti tentang implementasi.
8	(Skripsi) Analisis kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Negeri & Swasta di Kota Yogyakarta 2006-2008	Benny Fitrianto (2010)	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada Tahun 2006-2008 telah berhasil memberikan kebijakan khusus bagi SMK Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu yang menunjang keberhasilan adalah dari faktor internal, yakni guru yang telah	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus penelitian, pada penelitian tersebut fokusnya adalah pada kebijakan publik secara umum, sedangkan penulis hanya memfokuskan kepada implementasi kebijakan, sehingga hasil penelitian dapat lebih mendalam.

			berkualifikasi tinggi (Fitrianto, 2010).	
9	(Skripsi) Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi APBD untuk Bidang Pendidikan	Herly Kusumawati (2010)	Pada tahun 2007-2008 Dinas Pendidikan kota Yogyakarta telah mengimplementasikan 20% anggaran untuk bidang Pendidikan. Salah satu yang menunjang keberhasilan ini dikarenakan telah terdatanya siswa-siswi melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) sehingga 20% anggaran dapat terserap secara penuh (Kusumawati, 2010).	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada Dinas Pendidikan, sedangkan penulis menganalisis objek secara lebih luas yaitu kepada Dinas Pendidikan dan aktor-aktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
10	(Skripsi) Konsep Tajdid Muhammadiyah dalam Meningkatkan kualitas pendidikan (SK: Implementasi di SMK Muhammadiyah Karangmojo)	Nanag Dwi (2010)	Konsep tajdid yang dimiliki Muhammadiyah merupakan purifikasi dalam bidang Pendidikan. Metode tajdid yang dilakukan oleh SMK Karangmojo adalah menggunakan keteladanan, penghargaan, hukuman, pembiasaan dan ceramah. Konsep ini, selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga untuk menjaga nilai-nilai keislaman (Dwi, 2010).	Perbedaan kedua penelitian ini terlihat dari studi kasus yang digunakan. penelitian tersebut meneliti tentang konsep tajdid, sedangkan penulis meneliti tentang program 1000 guru berprestasi. Namun pada dasarnya kedua peneliti ini memiliki variabel yang sama, yakni tentang implementasi kebijakan.

11	(Jurnal) Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo	Asna Aneta (2010)	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini akibat adanya responsivitas yang baik dari pemerintah serta adanya dukungan dari masyarakat Gorontalo (Aneta, 2010).	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada studi kasus dan Teknik pengumpulan data yang digunakan. penelitian tersebut menggunakan studi kasus diaspek ekonomi dengan pengumpulan data yakni wawancara dan FGD. Sedangkan penulis menggunakan studi kasus pendidikan dan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data.
12	(Jurnal) Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik	Mada Sutapa (2008)	Dalam konteks kebijakan publik, pendidikan adalah barang dan jasa milik Bersama. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pemerintah harus memberikan secara pendidikan secara merata(Sutapa, 2008).	Hasil Penelitian ini menjelaskan konsep kebijakan pendidikan dalam aspek kebijakan publik secara umum. Sedangkan penulis meneliti kebijakan publik lebih spesifik pada implementasi kebijakan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi itu sendiri.

13	(Jurnal) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Pembelajaran yang Tepat	Abdul Mukhid (2007)	Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh aspek. Dari kepala sekolah, Rektor, Guru, dosen karyawan hingga peserta didik memiliki pengaruh yang sama-sama besar (sesuai tugas dan peran). Ciri-ciri berhasilnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari terlaksananya sistem pembelajaran yang tepat (Mukhid, 2007).	Kedua penelitian memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian tersebut fokus dalam pembangunan sistem pendidikan secara umum, sedangkan penulis spesifik meneliti terkait program dalam mencapai kualitas pendidikan.
14	(Jurnal) Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif Kunci Pencapaian Kualitas Pendidikan.	Ekosiswoyo (2007)	Kepala sekolah adalah salah satu kunci dalam mencapai kualitas Pendidikan. Kepala sekolah harus pandai dalam memimpin dan memenejemen sekolah agar sesuai dengan fungsi dan aturan yang berlaku. Kemudian seorang kepala sekolah harus bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi guru dan staffnya sehingga memiliki kerangka waktu yang jelas (Ekosiswoyo, 2007).	Perbedaan mendasar penelitian ini adalah pada studi kasus, penelitian tersebut memberikan studi kasus yang fokus pada kepemimpinan, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi program pemerintah, namun sejatinya kedua penelitian ini membahas tentang kualitas pendidikan.
15	(Buku) Kebijakan Publik :	Riant Nugraha (2004)	Kebijakan publik memiliki peran krusial dalam	Perbedaan buku ini dengan penelitian penulis

	Formulasi, Implementasi dan Evaluasi		pembangunan suatu negara. Negara yang unggul dapat dilihat dari kebijakan publiknya yang <i>excellent</i> . Salah satu yang menyebabkan Indonesia mengalami kemerosotan adalah akibat kebijakan publiknya yang kurang baik (Nugraha, 2004).	adalah pada studi kasus,yaitu berfokus pada implementasi kebijakan yang diulas secara lebih mendalam beserta data.
--	--------------------------------------	--	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dilihat secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pengkajian topik, yakni mengenai analisis kebijakan publik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada teori dan fokus yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori grindle tentang implementasi kebijakan, dimana teori ini tidak ditemukan pada penelitian terdahulu diatas. Teori ini memiliki kelebihan, yakni akan melihat faktor politik dari aktor eksternal dan berfokus pada implementasi kebijakan secara mendalam. Kemudian yang akan diteliti merupakan program terobosan dalam dunia pendidikan, yakni tentang program 1000 guru berprestasi.

Melihat dari hasil studi terdahulu yang telah di paparkan diatas. Penelitian yang diteliti oleh penulis ini merupakan sebuah kebaruan dan layak untuk di teliti. Kemudian terkait dengan penelitian terbaru yang hendak dilakukan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantann Selatan yang berjudul “Analisis Implementasi Program 1000

Guru Berprestasi Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu Tahun 2017-2018.

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Kebijakan Publik

(James, 1997) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Untuk melengkapi pendapat Anderson, Edward III dan Ira Sharkansky dalam (Islamy, 2016) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau juga dalam *policy statement* yang berbentuk wacana atau pidato yang diungkapkan oleh pejabat politik maupun pemerintahan yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Sedangkan (Thoha, 2010) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu alokasi otoritatif pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan dan semua itu bagi kepentingan seluruh masyarakat. Tidak jauh berbedam, (Dye, 2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat kehidupan bersama terlihat berbeda.

Sementara itu (Syafiie, 2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai semacam jawaban untuk memecahkan dan meminimalisir terjadinya masalah yang dilakukan dengan inovasi yang baik dan terarah

(Thoha, 2010) menjelaskan ada lima proses yang ada dalam kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Identifikasi Masalah, dimana disini ada tuntutan dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah
- b. Perumusan Kebijakan, dalam perumusan kebijakan pemerintah akan mengagregasi usulan maupun tuntutan darimasyarakat
- c. Pengesahan Kebijakan, Setelah dirumuskan maka pemerintah akan menetapkan dan mengesahkan kebijakan itu sebagai undang-undang yang memiliki legalitas secara hukum
- d. Implementasi Kebijakan, disini akan ada penataan birokrasi, penyediaan anggaran dan lain-lain dalam rangka mendukung berjalannya suatu kebijakan
- e. Evaluasi Kebijakan, melakukan penilaian dan menyarankan perubahan terhadap suatu kebijakan jika diperlukan.

Menurut (Dye, 2005) Kebijakan publik juga dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dengan batas kewenangan masing-masing. Hal ini disebabkan karena tiga hal kewenangan yang dimiliki pemerintah diantaranya:

- a. Hanya pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memberlakukan kebijakan publik secara luas dan menyeluruh kepada publik yang menjadi sasaran kebijakan.

- b. Hanya pemerintah yang memiliki kekuatan untuk mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara luas dan menyeluruh kepada publik yang menjadi sasaran kebijakan.
- c. Hanya pemerintah yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Salah satu ciri dari suatu kebijakan publik adalah memiliki tujuan dan kebermanfaatannya (*public policy is purposive*). Tujuan dan manfaat tersebut harus dirumuskan secara rasional sesuai kondisi, kedudukan, wewenang, fungsi dan kemampuan berorganisasi. Misalnya organisasi ditingkat kecamatan tidak akan tepat jika membuat tujuan sama seperti di organisasi tingkat pusat (Zainal, 2016).

(Dye, 2005) menjelaskan manfaat dari kebijakan publik, diantaranya:

- a. Mengidentifikasi dampak dari kebijakan publik, kebijakan publik disini dapat sebagai *variable independent* yang akan mencari *variable-variable* yang dapat mempengaruhi isi dari suatu kebijakan publik.
- b. membantu dalam memecahkan permasalahan publik, hadirnya suatu kebijakan publik adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada publik.
- c. Berfungsi untuk tujuan politik, sebuah kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang baik dan benar dengan dukungan teori yang kuat akan memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan publik yang baik dan benar dapat meyakinkan lawan politik yang tadinya tidak setuju, sehingga kebijakan tersebut tidak akan mudah dicabut.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak bermakna. Banyak kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan oleh tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri, namun kemudian tidak memberikan dampak apapun dikarenakan dalam kehidupan dikarenakan tidak mampu maupun tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tahap yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan publik. Setiap program harus diimplementasikan agar dapat memiliki dampak dan tujuan yang diharapkan. Implementasi kebijakan juga dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai tahapan lanjutan setelah undang-undang ditetapkan, dimana aktor, prosedur, organisasi dan teknik bekerja secara bersama untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program (Winarno, 2014).

(Hanifah & Jusuf, 1994) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai suatu pelaksanaan asas dan konsep yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan maupun tindakan. Untuk melengkapi definisi diatas (Wahab, 1997) mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan pelaksanaan program tidak hanya badan-badan administratif, namun juga menyangkut faktor eksternal seperti, kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan pemerintahan yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keperluan yang terjadi didalam masyarakat atau karena dipandang lebih efisien. Ada dua sistem pengelolaan pemerintahan yang biasa dilakukan didunia. Pertama, pengelolaan pemerintahan dengan sistem desentralisasi, yakni dengan dengan melimpahkan pengambilan kebijakan dan tanggungjawab kepada organisasi yang lebih rendah.. kedua, sistem privatisasi, dimana kewenangan dan tanggungjawab diberikan kepada pihak luar (Zainal, 2016).

(James, 1997) mengatakan ada empat aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: 1) siapa yang mengimplementasikan, 2) hakikat dari proses suatu administrasi, 3) kepatuhan dan 4) dampak dari implementasi kebijakan. Disisi lain (Ripley & Franklin, 1990) mengatakan ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's Happening?* (apa yang terjadi).

Sementara itu, menurut (Grindle, 1980) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi (*contents*) dan lingkungan (*konteks*). Kemudian Grindle mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk kaitan (*linkage*) sehingga memudahkan dalam merealisasikan suatu tujuan yang diharapkan. Setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan. Namun hal ini tidak selalu berjalan dengan baik, tergantung kepada kemampuan pelaksana program. Pada akhirnya implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan itu sendiri.

a. Kontek isi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan berbeda akan lebih sulit diimplementasikan daripada yang menyangkut sedikit kepentingan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang dapat langsung dirasakan kebermanfaatannya oleh sasaran, maka akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Jika dampak dari kebijakan dapat memberikan manfaat dengan jelas, maka kebijakan tersebut akan lebih mudah diimplementasikan. Hal ini berbeda jika bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku oleh penerima kebijakan.

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, maka indikator ini akan menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program 1000 guru berprestasi, namun pertanyaannya apakah letak program tersebut sudah tepat berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

5. Siapa pelaksana program

Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang berkompeten demi keberhasilan program tersebut.

6. Sumber daya yang dikerahkan

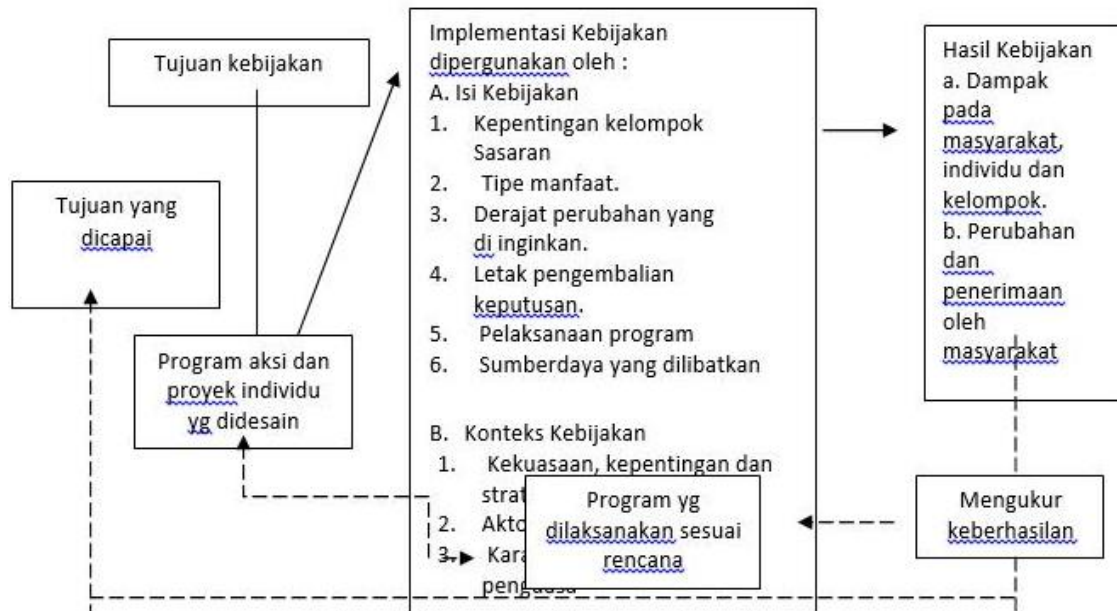
Sumber daya baik bentuk, jumlah maupun asal yang digunakan dalam program akan menentukan keberhasilan program.

b. Sedangkan konteks implementasi kebijakan diantaranya:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber : Grindle, 1980

(Zainal, 2016) menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan, antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut.

- Kondisi fisik, seperti terjadinya bencana alam maupun perubahan musim. Faktor-faktor alam seperti ini dianggap bukan sebagai sebuah kegagalan dan dapat dimaafkan. Namun dalam kasus tertentu hal ini dapat dicegah, sehingga dapat mengurangi resiko.
- Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang menyebabkan pertukaran pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakan orientasi implementasi yang berbeda.

- c. Tabiat (*attitude*), tabiat dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar dalam menunggu proses kebijakan dan memaksa melakukan perubahan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan, bahkan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.
- d. Terjadinya penundaan, hal ini biasanya dikarenakan kurang atau bahkan tidak tersedianya faktor *input* sebagai pendukung implementasi suatu kebijakan.
- e. Langkah (*step*), kelemahan pada suatu langkah/tahapan akan mempengaruhi seluruh implementasi kebijakan.
- f. Kelemahan pada kebijakan, kelemahan ini dapat terjadi dikarenakan kurang tepatnya teori yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

3. Kebijakan Pendidikan

(Tilaar, 2008) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai segala proses dan hasil perumusan langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan menurut Chon dalam (Saputra & Junaidi, 2011) kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan keadaan dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu untuk diketahui. Jadi dalam pengertian ini dapat dijelaskan lebih jauh apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, anggaran untuk pembelajaran dan kualifikasi pendidikan guru memenuhi syarat.

Kemudian (Imran, 1999) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakter, diantaranya:

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku disuatu wilayah tersebut dalam rangka memberikan sumbangsih dalam pendidikan.

b. memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai suatu panduan yang bersifat umum harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan. Konsep operasional didalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut

c. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli dibidang pendidikan, sehingga tidak merusak pendidikan maupun yang diluar pendidikan.

d. Dapat dievaluasi

Kebijakan Pendidikan yang telah diimplementasi perlu dievaluasi untuk ditindaklanjuti. Apabila kebijakan itu baik, maka perlu dipertahankan dan dikembangkan, namun apabila mengandung kesalahan, maka perlu diperbaiki.

e. Memiliki Sistematika

Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas, bersifat efektif dan efisien dan menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur.

Di Indonesia sendiri arah kebijakan Indonesia didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diarahkan kepada hal-hal berikut:

- a. Mengupayakan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tinggi secara luas dan inklusif dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas dengan meningkatkan anggaran pendidikan.
- b. Meningkatkan profesionalitas, kemampuan akademik serta jaminan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi optimal dalam meningkatkan kewibawaan Lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk didalamnya pembaharuan terhadap kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum sesuai kepentingan setempat secara profesional dalam rangka mengakomodir dan melayani keberagaman peserta didik.
- d. Memberdayakan setiap lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, sikap dan nilai serta meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.

- e. Mengoptimalkan sistem pendidikan nasional berdasarkan desentralisasi, manajemen dan otonomi keilmuan.
- f. Meningkatkan kualitas setiap lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memaksimalkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan IPTEK.
- g. Mengembangkan kualitas SDM sejak dini secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya pro aktif oleh seluruh elemen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal yang disertai dengan dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

G. Definisi Konseptual

Menurut (Singarimbun & Effendi, 1989) definisi konseptual adalah suatu pemaknaan dan penyerdehanaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep dilapangan. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang berisikan tujuan tertentu dan dirumuskan secara rasional sesuai kondisi, kedudukan, wewenang, fungsi dan kemampuan berorganisasi yang kemudian biasanya ditetapkan dalam bentuk undang-undang.

2. Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah tahapan lanjutan setelah undang-undang ditetapkan dan kebijakan telah ditransformasikan menjadi program, dimana didalamnya aktor, prosedur, organisasi dan Teknik bekerja secara bersama untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan adalah segala proses dan hasil perumusan langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dengan maksud mencapai tujuan pendidikan.

4. Program 1000 Guru Berprestasi

Program 1000 Guru Berprestasi adalah satu program yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (tenaga pendidik/guru) agar mampu menciptakan lebih banyak siswa-siswi Tanah Bumbu yang berprestasi.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan yang digunakan peneliti agar ruang lingkup penelitian dapat lebih konkrit. Sedangkan (Azwar, 2013) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang berisi tentang variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga mempermudah untuk diamati. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memilih alat ukur sesuai tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu konteks isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.

a. Konteks isi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pasti akan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Program 1000 guru berprestasi sendiri selain dipengaruhi oleh pemerintah daerah Tanah Bumbu, juga dipengaruhi oleh pihak swasta sebagai pemberi dana CSR, hal tersebut yang akan diketahui lebih lanjut.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Indikator ini menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan harus membawa dampak positif dari suatu implementasi kebijakan. Sebagai contoh masyarakat desa batulicin lebih suka program 1000 guru berprestasi daripada program *full day school*.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan pasti menginginkan target yang ingin dicapai. Indikator ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus menghadirkan suatu perubahan dan perubahan tersebut harus memiliki skala yang jelas. Secara terukur program 1000 guru berprestasi mengharapkan suatu perubahan, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas siswa-siswi tanah bumbu dalam mengikuti kompetisi OSN baik dalam kancah provinsi maupun nasional.

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, maka indikator ini akan menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program 1000 guru berprestasi, namun pertanyaannya apakah letak program tersebut sudah tepat berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

5. Siapa pelaksana program

Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang berkompeten demi keberhasilan program tersebut. Maka program 1000 guru berprestasi ini harus memiliki implementator yang jelas.

6. Sumberdaya yang dikerahkan

Didalam program 1000 guru berprestasi, pelaksana program harus didukung dengan sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar program tersebut dapat terimplementasi dengan baik.

b. Sedangkan konteks implementasi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam kebijakan harus mempertimbangkan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam rangka memperlancar jalannya suatu implementasi kebijakan. Kematangan dalam pertimbangan ini akan mempengaruhi keberhasilan suatu program dalam hal ini adalah program 1000 guru berprestasi.

2. karakteristik lembaga dan penguasa

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Maka indikator ini akan menjelaskan karakteristik lembaga-lembaga terkait yang turut mempengaruhi program 1000 guru berprestasi.

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

Hal lain yang mempengaruhi keberhasilan program atau kebijakan adalah dari kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Maka indikator ini akan menjelaskan sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam mengimplementasikan program 1000 guru berprestasi.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Menurut (Nawawi, 1995) jenis deskriptif dapat dimaknai sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek, fenomena sosial penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Berbeda dengan metode pendekatan eksploratif dan eksplanatif, metode pendekatan deskriptif memiliki desain rumusan yang baik, disamping itu metode ini dapat menjelaskan suatu gambaran yang kompleks dan meneliti berbagai macam poin secara detail mengenai implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Tanah Bumbu tahun 2017-2018.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada tempat penelitian (Sugiyono, 2010). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang menjadi subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang diperoleh secara tidak langsung (Sugiyono, 2010). Data sekunder berkaitan dengan objek penelitian yaitu implementasi program 1000 guru berprestasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 1.2

Data Primer dan Sekunder yang Diperlukan

No	Jenis Data	Data yang Diperlukan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Data Primer	1. Latar belakang lahirnya program 1000 Guru Berprestasi	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wawancara
		2. Indikator keberhasilan Program	Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK)	
		3. Kejuaraan OSN yang diikuti selama 2017-2018	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan	
		4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program	Kepala Seksi Pengembangan PTK	
		5. Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi program	Kepala Seksi Pengembangan PTK	
		6. Alasan Pemberian CSR	PT Jhonlin Group	
		7. Kelebihan dan Kekurangan Program	Guru Penerima Program	

2	Data Sekunder	1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Bumbu	Bidang Evaluasi Dokumentasi dan Laporan	Dokumentasi
		2. Angka Putus Sekolah, Angka Lulusan, Angka Melanjutkan	Bidang Evaluasi Dokumentasi dan Laporan	
		3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Evaluasi Dokumentasi dan Laporan	
		4. Struktur Organisasi dan penjabaran tupoksi	Bidang Evaluasi Dokumentasi dan Laporan	
		5. Pegawai (Jumlah, Pangkat dan Jenjang Pendidikan)	Kepala Bagian Kepegawaian	
		6. Buku, Jurnal & Skripsi baik <i>online/offline</i>	Perpustakaan, Repository UMY, JSTOR dll.	
		7. Undang-undang terkait	Internet	

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Bogdan dalam (Nawawi, 1995) Dokumentasi merupakan suatu pelengkap metode wawancara didalam penelitian kualitatif. Lebih tepatnya dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, biasanya berbentuk gambar, tulisan, foto dan video. Hasil penelitian akan lebih *credible* jika didukung dengan sebuah dokumentasi.

b. Wawancara

Menurut (Moleong, 2002) wawancara merupakan cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kegiatan wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yang terdiri dari pewawancara dan yang orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara bertujuan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan kejadian, orang hingga organisasi, sehingga didapatkan data yang diperlukan.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	PERTIMBANGAN
1	ROSWANDI SALEM M.Sos	SEKRETARIS DAERAH TANAH BUMBU	Menjadi pelopor program 1000 guru berprestasi
2	Drs. ABDUL LATIF	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Memiliki kapasitas informasi tentang gambaran umum program 1000 guru berprestasi
3	SUHARYONO, M.Pd	KASI PENGEMBANGA N PTK	Memiliki kapasitas informasi secara lebih rinci atas implementasi program 1000 guru berprestasi
4	FIRDAUS, S.Pd.SD	KASI KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
5	ALI KHALID ATMANEGARA, ST (PT JHONLIN GROUP)	PERWAKILAN PEMBERI CSR	Memiliki sumbangsih atas berjalannya program 1000 guru berprestasi

6	BAHRUL, S.Pd	PENERIMA PROGRAM	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
7	ANI SURITA, S.Pd	PENERIMA PROGRAM	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
8	MUHAMMAD SAIHU, M.Pd	PENERIMA PROGRAM	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
9	SITI ALVIATI, S.Pd	PENERIMA PROGRAM	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
10	IFIET NURMAIROH, S.Pd	PENERIMA PROGRAM	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
11	MUKHLIS, S.Pd	KEPALA SEKOLAH SDN 1 KOTA PAGATAN	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
12	ZAHRA TUSIFFA	SISWI SDN 1 KOTA PAGATAN	Memiliki kapasitas informasi atas hasil dari implementasi program 1000 guru berprestasi
13	RUDI HARTONO, ST	KETUA LSM LINTAH	Memiliki kapasitas informasi sebagai pengontrol pemerintah

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain. Data dalam penelitian ini adalah data mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis interaktif. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara tuntas hingga datanya utuh. Kemudian menurut (Moleong, 2002) terdapat beberapa aktifitas dalam analisis data, diantaranya:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu strategi dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui Teknik-teknik yang relevan, yaitu dengan mencari, mencatat dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara untuk memilih hal-hal umum agar mendapatkan hal-hal pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dikarenakan data terkait implementasi kebijakan 1000

guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu jumlahnya cukup banyak, maka tugas selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

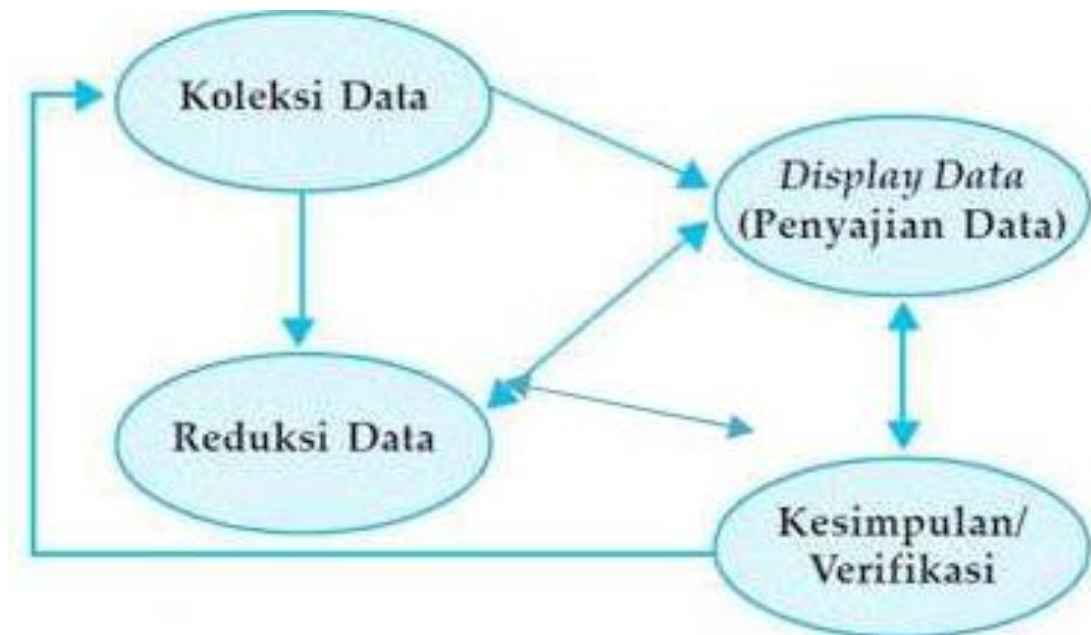
c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengolahan data setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan telah memiliki keseragaman serta alur tema yang jelas. Penyajian data sendiri dituliskan dalam bentuk teks dan bersifat naratif untuk menggambarkan apa yang terjadi dilapangan. Penyajian data ini berfungsi untuk merapikan data, sehingga akan lebih mudah mendeskripsikan tentang implementasi program 1000 guru berprestasi.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada prinsipnya penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menjawab rumusan masalah dengan didasarkan pada data-data yang valid. Pada penelitian ini, kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti akan didukung dengan data-data lapangan yang sebelumnya telah direduksi dan dilakukan penyajian. Sehingga jawaban dari hasil penelitian akan menjelaskan dan menyimpulkan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Gambar 1.2
Aktifitas dalam analisis



Sumber : Moleong, 2002

5. Lokasi Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang diambil adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini didasarkan mengingat program 1000 guru berprestasi dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu secara langsung.